

FILM DOKUMENTER *SEXY KILLERS* SEBAGAI ALAT KRITIK KANDIDAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

Yugha Erlangga

*Konsultan Media dan Penerbitan
Bekasi, Jawa Barat
begawan_erlangga@yahoo.com*

Abstract

*This writing is based on the increasing variety of criticism deliveries to the candidates of 2019 Presidential Election; one of them is through a documentary titled *Sexy Killers*. The film produced by Watchdoc production house and directed by a senior journalist, Dandhy Dwi Laksono, is the second work that welcomes the election season, after in 2014 they released a documentary *Yang Ketujuh*. *Sexy Killers* is a creative product that contains criticism on the ruler's policies—one that competed in 2019 Presidential Election. Witnessing the development of the digital world, one of them is the existence of Youtube channel, the public access to *Sexy Killers* is easier. The existence of *Sexy Killers* is inevitable in democracy because of the openness of public space. This writing will measure the length of how a creative product, such as a documentary, can influence the discourse in public space towards the candidates in the election. This research uses a descriptive analytical method. The data collection is also done by interviewing Dandhy Dwi Laksono as the director. This writing is also supported by the media study and other literature that contain the debate and polemic of *Sexy Killers*'s existence in public. The finding of this writing shows that *Sexy Killers*, which up to July 2019 has been accessed by approximately 24 million viewers, is capable in giving the effect in returning a substantial discourse to the public space in the middle of satiety on debate issues between the candidates of 2019 Presidential Election.*

Keywords: *film, documentary, election, communication, public sphere*

Abstrak

Penulisan ini didasarkan atas semakin variatifnya penyampaian kritik kepada kandidat Pemilihan Presiden 2019 lalu, salah satunya melalui film dokumenter berjudul *Sexy Killers*. Film yang diproduksi oleh rumah produksi *Watchdoc* sekaligus disutradarai oleh jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono adalah karya keduanya menyambut musim Pemilu, setelah pada 2014 merilis film dokumenter *Yang Ketujuh*. *Sexy Killers* adalah produk kreatif yang bermuatan kritik atas kebijakan penguasa –yang notabene berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2019. Menyaksikan perkembangan dunia digital, salah satunya dengan kehadiran kanal *Youtube*, kian memudahkan akses publik terhadap *Sexy Killers*. Kehadiran *Sexy Killers* adalah keniscayaan dalam demokrasi karena terbukanya ruang publik. Tulisan ini akan mengukur sejauh mana produk kreatif seperti film dokumenter sanggup mempengaruhi diskursus dalam ruang publik terhadap kandidat dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara film. Penulisan juga ditopang oleh studi media dan literatur yang berisi perdebatan sekaligus polemik kehadiran *Sexy Killers* di hadapan publik. Temuan dari penulisan ini menunjukkan bahwa *Sexy Killers* yang hingga per Juli 2019 telah diakses sebanyak kurang lebih 24 juta penonton, mampu memberikan efek yaitu mengembalikan Diskursus substansial ke Ruang Publik di tengah jenuhnya isu perdebatan antarkandidat Pemilihan Presiden 2019.

Kata kunci: film, dokumenter, pemilu, komunikasi, ruang publik

1. Pendahuluan

Kemeriahan pesta demokrasi dirayakan dengan berbagai macam cara. Pada era teknologi informasi yang pesat kini, berbagai produk, baik visual, audio, hingga audio visual yang berisi informasi hingga kampanye para kandidat dengan cepat terpublikasi atau tersebar melalui media sosial.

Pada tahun 2019 ini, Indonesia mencatatkan sejarah dengan menyelenggarakan Pemilu Serentak yang bertujuan untuk memilih anggota legislatif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat dan juga Presiden dan Wakil Presiden. Penggabungan pemilu eksekutif

dan legislatif sangat korelatif karena calon presiden nantinya merupakan refleksi dari basis ideologi parpol pendukung dan terbangunnya relasi antara komitmen partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden (Haris, 2016).

Perdebatan antarpengukung, terutama untuk pasangan calon tidak hanya terjadi di ruang terbuka, melainkan terbawa arus hingga ranah media sosial. Platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga WhatsApp, tak lepas dari konten-konten yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dari para pendukung pasangan calon. Melalui meme, pesan singkat, foto hingga video.

Padatnya alat peraga kampanye di ruang terbuka hingga riuhnya media sosial berujung pada perdebatan yang tidak substansial, seperti saling serang karakter masing-masing kandidat hingga polemik jumlah masing-masing pendukung yang hadir dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno. Hadirnya sebuah film dokumenter berjudul *Sexy Killers*, tiga hari sebelum pencoblosan, yang diunggah oleh rumah produksi Watchdoc di kanal Youtube kembali membuka mata publik. Isu penting yaitu kerusakan lingkungan yang selama ini dianggap tema pinggiran dibandingkan isu-isu lain seperti persoalan hak asasi manusia hingga toleransi beragama kembali mengemuka. Perdebatan *gimmick* selama ini pun kembali bergeser kepada isu yang selama ini terabaikan: kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara yang melibatkan oligarki.

Kehadiran *Sexy Killers* yang mengangkat isu kerusakan lingkungan dan permainan oligarki ini mampu menarik perhatian publik yang notabene akan memilih pada Pemilu Serentak 2019. Tontonan ini menjadi alternatif dan memperkaya referensi memilih saat hari pencoblosan. Film berdurasi 80 menit ini hadir dengan substansi yang terang: alat kritik. Persoalannya, sejauh mana film dokumenter ini mampu berperan sebagai alat kritik yang efektif bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden dari dua kubu.

Sejatinya, film merupakan produk kreatif yang lazim menjadi sarana hiburan bagi khalayak. Meski sejarah kapan film pertama kali dirilis ke publik masih menjadi polemik hingga kini, namun, pemutaran perdana film pendek oleh Lumière Bersaudara di Paris pada 22

Maret 1895, dianggap sebagai tonggak dimulainya film, yang populer dengan sebutan *gambar bergerak* pada masa itu (Cook, 2004). Memasuki abad ke-20, film berkembang menjadi industri yang sangat menjanjikan. Film tidak lagi bisu atau hitam putih di abad ini. Selain telah berwarna dan memiliki suara dalam penayangannya, film modern juga memiliki variasi cerita dan genre. Pada abad inilah, Hollywood, ikon industri film Amerika Serikat, merajai pangsa pasar film dunia. Eksistensi Hollywood ini pula yang kemudian menentukan arah perkembangan genre-genre perfilman. Genre, turunan dari kata *genus* dalam bidang biologi, merupakan jenis, tipe, atau klasifikasi dari beberapa film yang memiliki karakter yang khas seperti latar, isi, dan cerita.

Film dokumenter adalah produk visual yang merekam kondisi yang menuturkan realitas tanpa interpretasi imajinatif. Dalam film dokumenter, sutradara mengobservasi suatu peristiwa dan fakta di lapangan lalu merekam gambar sesuai apa adanya. Cara kerja sutradara film dokumenter ini mirip dengan cara kerja jurnalis televisi dalam merekam sebuah peristiwa. Jika cerita pada film fiksi bersandar pada alur atau plot, maka dalam fokus film dokumenter atau non-fiksi tertuju kepada isi dan pemaparannya (Ayawaila, 2008).

Sejarah mencatat beberapa film dokumenter awal. Pada 1920, Robert Flaherty membuat film promosi produk jaket musim dingin berjudul *Nanook of the North* dirilis pada 1922 (Ayawaila, 2008). Flaherty merekam kehidupan keluarga Nanook, sebuah keluarga suku Eskimo. Setahun sebelumnya, Charles Sheeler dan rekannya, Paul Strand,

membuat film berjudul *Manhatta*. Film berdurasi kurang lebih 10 menit ini merekam kota New York sebagai subyeknya, tanpa narator, namun dilatari musik dan selingan teks.

Film dokumenter pun tak sekadar menjadi alat promosi, melainkan mulai berubah menjadi alat propaganda. Dziga Vertov, sineas asal Uni Soviet, yang memulai penggunaan film dokumenter sebagai alat propaganda. Vertov adalah pendukung Lenin dan Revolusi Bolsheviknya. Karena itu, Vertov memproduksi film dokumenter yang linear dengan kebijakan politik Lenin. Berbarengan dengan tahun rilis *Nanook of the North*, pada 1922, Vertov pun memulai serial Kino-Pravda atau *Film Truth* dalam bahasa Inggris (Ayawaila, 2008).

1.1. Memposisikan Film Dokumenter sebagai Alat Kritik

Berkebalikan dari karya-karya film Vertov yang sarat propaganda, begitu juga dengan cara kerja NAZI melalui Joseph Goebbels, belakangan film dokumenter juga dipakai sebagai alat kritik kepada penguasa. Melalui kekuatan audio visual dewasa ini, ditambah perkembangan teknologi informasi, film dokumenter kian berbobot dijadikan sebagai medium kritik yang kuat, seperti dilakukan oleh Michael Francis Moore, sutradara film sekaligus penulis naskah tersohor. Moore melalui karya-karya dokumenternya merupakan produk investigatif sekaligus pamflet bagi kebijakan pemerintah Amerika Serikat (Jusuf, 2014).

Pada 2002, Moore melalui filmnya *Bowling for Columbine* melancarkan kritik terhadap kebijakan kepemilikan senjata yang berujung pada maraknya aksi

kekerasan bersenjata, terutama tragedi penembakan brutal yang menewaskan 12 orang di Sekolah Menengah The Columbine, Amerika Serikat, pada 1999. Karya Moore tadi diganjar penghargaan Oscar pada 2002 untuk kategori *Best Documentary Feature*. Pada 2004, Moore kembali lagi dengan karyanya berjudul *Fahrenheit 9/11*, yang mengkritik kebijakan Perang Melawan Teror (*War on Terror*) Presiden George W. Bush.

Sama halnya dengan Amerika, salah film dokumenter yang bermuatan kritik pun muncul tepat pada peristiwa penting: Pemilihan Umum Serentak 2019. Film dokumenter berjudul *Sexy Killers* yang diproduksi oleh rumah produksi *Watchdoc* sekaligus disutradarai oleh jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono adalah karya kedua menyambut musim Pemilu, setelah pada 2014 merilis film dokumenter *Yang Ketujuh*. Seperti halnya, film dokumenter *Fahrenheit 9/11* (2004) atau *Sicko* (2007) karya sineas AS Michael Francis Moore, *Sexy Killers* adalah produk kreatif yang bermuatan kritik atas kebijakan penguasa yang notabene sedang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2019 saat itu. *Sexy Killers* karya Dandhy mengajak penonton untuk melihat keterkaitan antara penguasa, batu bara, dan kerusakan lingkungan, seperti *Sicko*-nya Moore, tentang keterkaitan antara industri farmasi dengan para senator.

Film dokumenter pertama dimomen Pemilu berjudul *Yang Ketujuh* pada 2014 lalu lebih menyoroti sudut pandang dan harapan masyarakat kecil pada sosok pemimpin masa depan Indonesia yang direpresentasikan oleh empat aktor yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, tukang ojek, pekerja bangunan,

dan petani penggarap. Dandhy berusaha menggali harapan-harapan kaum marginal tersebut terhadap akses kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga bantuan tunai langsung. Sang sutradara juga menampilkan sejumlah tayangan yang berisi janji kampanye dua pasangan saat itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Lima tahun kemudian, tiga hari menjelang pencoblosan, Watchdoc kembali merilis film dokumenter yang kali ini pada posisi yang lebih kritis yaitu menyorot hubungan antarkorporasi tambang yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dengan lingkaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pemilu Serentak 2019.

Kehadiran film ini langsung mendapat respons yang beragam. Ada yang mendukung dan menyambut baik, namun tak sedikit pula yang mengecamnya karena dianggap tidak memenuhi unsur keberimbangan (*cover both sides*). Namun, melihat fakta animo publik terhadap tayangnya *Sexy Killers* yang telah diakses sebanyak 24.312.270 penonton per juli 2019 atau tiga bulan dari penayangan perdananya menunjukkan isu ini direspons oleh publik. Selain itu, penayangan perdananya disambut dengan agenda nobar (nobar) di lebih dari 10 kota di antaranya Semarang, Samarinda, Surabaya, Kupang, dan Makassar. Tiga hari pertama penayangan, sudah terdapat 74 lokasi yang menggelar acara nonton bareng (beritagar, 2019). Kehadiran *Sexy Killers* adalah fenomena yang menarik untuk dicermati tentang bagaimana kehadiran sebuah tayangan yang begitu “serius” dari sisi tema, sarat kritik, dan berformat film dokumenter mampu

menarik perhatian publik sedemikian besar.

2. Metode Penelitian

Untuk melihat bagaimana film dokumenter bekerja sebagai alat kritik, maka penulis menggunakan pendekatan analitis-deskriptis untuk melihat latar belakang sutradara Dandhy Dwi Laksono membuat film dokumenter *Sexy Killers*, sekaligus bagaimana film ini bekerja hingga membuka Ruang Publik untuk terlibat dalam diskursus yang substansial. Dengan melakukan studi pustaka dan media, penulis berusaha menggali proses di balik layar pembuatan *Sexy Killers* sekaligus melihat dampak yang diberikan oleh film ini terhadap diskursus publik terkait isu-isu elektoral bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

3. Perspektif Teori

Sejatinya, kritik yang membangun adalah sejumlah saran dan petunjuk bukan ancaman apalagi kendali yang menyudutkan si penerima kritik (Susetiawan, 1997). Meski secara harfiah, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lima* (Kemendikbud, 2016), kritik diartikan sebagai kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Jika merujuk pada Max Horkheimer, filsuf Jerman yang merupakan generasi pertama Mazhab Frankfurt yang mahsyur itu bersama dengan Adorno, Formm, dan Marcus, maka teori kritik tak lepas dari upayanya membongkar pemikiran Hegel dan Marx.

Generasi pertama Mazhab Frankfurt yang kebanyakan keturunan Yahudi ini

mengalami tekanan di era Nazi yang memaksa mereka hijrah ke Amerika Serikat pada 1933 (Sindhunata, 1982). Eksodus para anggota Mazhab Frankfurt ke Negeri Abang Sam justru mempertontonkan langsung budaya media massa yang mencakup film, musik, radio, televisi, dan lainnya. Korporasi-korporasi besar adalah aktor tunggal yang mengontrol media hiburan untuk sampai kepada masyarakat tanpa campur tangan negara. Masyarakat pun kian terseret pada budaya massa komersial, salah satu ciri masyarakat kapitalis. Teori ini seharusnya turut memperhatikan aspek-aspek dunia sosial lain, seperti ekonomi, positivisme, sosiologi, masyarakat modern, hingga budaya. Teori kritis ditujukan untuk membongkar selubung ideologis yang merenggut kebebasan dan kejernihan pikiran individu modern, akan tetapi Teori Kritis awal berakhir dengan kebuntuan (Hardiman, 2009). Setelah generasi pertama Mazhab Frankfurt, hadirlah Jurgen Habermas sebagai generasi kedua.

3.1 Habermas: Masyarakat Komunikatif, Ruang Publik, dan Demokrasi Deliberatif

Berbeda dengan Marx yang mengabaikan sama sekali aspek komunikasi, Habermas justru menitikberatkan pemikirannya dalam aspek tersebut. Habermas menyoroti tumbuhnya industri media cetak yang memungkinkan massa untuk berdiskusi di dalam ruang publik. Dalam ruang-ruang ini, masyarakat dapat bertukar argumen demi klaim atas kebenaran.

Pemikiran Habermas sejatinya merupakan kritik terhadap Marxisme dan para generasi awal Mazhab Frankfurt.

Berbeda dengan Marx dan pendahulunya di Sekolah Frankfurt, Habermas menekankan pada konsep subyek dan rasio yang dialogis yang bertopang pada subyek lainnya melalui komunikasi.

Bagi Habermas, eksistensi Ruang Publik akan membuat individu saling mengerti satu dengan lainnya. Ruang Publik diisi oleh “Masyarakat Komunikatif” yang melakukan kritik melalui argumentasi, bukan kekerasan atau paksaan lainnya. Individu akan saling memahami antara satu dengan yang lainnya di Ruang Publik. Menariknya, Habermas memandang dengan kritis bahwa elemen-elemen masyarakat modern, mulai dari negara, organisasi birokratis, hingga pasar justru menghalangi dialog itu terjadi di Ruang Publik sehingga mengacaukan proses komunikasi di masyarakat. Dampaknya, pemahaman antarindividu semakin sulit terjalin (Ritzer, 2007).

Sejatinya, Ruang Publik adalah ruang demokratis di mana masyarakat berada pada wahana diskursus yang membuka lebar pintu opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa disampaikan secara diskursif. Karena itu, Ruang Publik juga menjadi tempat warga untuk berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politisnya. Ruang Publik harus bersifat bebas dari intervensi pemerintah dan otonom, mudah diakses masyarakat sehingga terhimpun solidaritas untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik (Hardiman, 2009).

Terciptanya Ruang Publik bisa dikatakan menjadi bentangan karpet merah bagi Demokrasi Deliberatif yang digagas pula oleh Habermas. Demokrasi Deliberatif bukanlah jargon besar yang memfokuskan pada aturan yang mengikat

warga, melainkan melihat apa yang ada di balik lahirnya peraturan-peraturan tersebut. Istilah Demokrasi Deliberatif memiliki makna yang tersirat yaitu diskursus, formasi opini, dan aspirasi politik, serta kedaulatan sebagai prosedur (Hardiman, 2009). Teori ini tidak hanya menaruh perhatian pada keputusan-keputusan kolektif, melainkan pula dapat membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Secara tidak langsung, opini-opini publik di sini dapat mengklaim keputusan yang membuat masyarakat mematuinya. Dalam pandangan Habermas, Demokrasi Deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan yang dirumuskan oleh mereka yang memegang mandat mendekati harapan pihak yang diperintah. Deliberasi semakin intens melalui diskursus publik ini merupakan jalan untuk mewujudkan hakikat demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat)

Demokrasi Deliberatif menempatkan kedaulatan rakyat mampu mengendalikan keputusan-keputusan mayoritas. Dengan begitu, rakyat mampu mengkritisi kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh mereka yang memegang mandat (Hardiman, 2009). Pada tahap inilah, masyarakat irasional telah bertransformasi menjadi masyarakat rasional dengan berani mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Aspirasi atau opini publik di sini memiliki fungsi untuk mengendalikan politik atau kebijakan formal.

Awalnya, film dipandang sebagai bagian dari produk budaya kapitalisme. Namun, dalam konteks *Sexy Killers*, paradigma itu bergeser. Melalui film

dokumenter ini, Ruang Publik dan Masyarakat Komunikatif menjadi keniscayaan di dalam masyarakat kita.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Menggeser Paradigma Film dari Industri Kebudayaan dan Propaganda Menjadi Alat Kritik

Film selama ini dianggap sebagai produk budaya massa komersial. Pandangan itu tidak lepas dari pandangan para pengagas awal Mazhab Frankfurt seperti Adorno, Horkheimer, Marcuse, dan Fromm. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian persepektif teori, para filsuf Jerman keturunan Yahudi ini melihat langsung fenomena media (film, musik, radio, dan televisi) di Amerika Serikat setelah dipaksa hijrah dari Jerman akibat tekanan Nazi pada 1933. Saat itu korporasi-korporasi besar tanpa dicampuri oleh negara, memproduksi berbagai bentuk tayangan hiburan, seperti film, musik, radio, dan televisi). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan budaya massa komersial sebagai ciri dari masyarakat kapitalis. Pada saat yang sama para pemikir Mazhab Frankfurt, seperti Horkheimer dan Adorno, memfokuskan studinya pada budaya kritis ini. Dari sinilah lahir istilah “industri kebudayaan” sebagai padanan dari industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah ketiak Kapitalisme.

Film atau tontonan, terutama film-film *hollywood*, adalah salah satu produk utama dari industri kebudayaan, yang tanpa disadari kehadirannya sebagai konsumsi sehari-hari kelas pekerja. Mereka yang seharian bekerja akan menjadikan tontonan di televisi sebagai hiburan di malam hari saat pulang,

sebelum akhirnya terlelap, untuk kemudian kembali menjalani rutinitas esok harinya. Mereka tanpa sadar dieksploitasi. Tontonan televisi maupun film bioskop merupakan industri kebudayaan yang merupakan bisnis dan berorientasi laba. Tujuannya jelas mencari untung dengan menjual rating atau jumlah penonton kepada pengiklan.

Tak hanya tontonan yang bersifat hiburan yang mengeksploitasi. Film tertentu bahkan digunakan oleh elemen-elemen masyarakat modern, mulai dari negara, organisasi birokratis, hingga pasar justru menghalangi dialog itu terjadi di Ruang Publik. Sebuah saja film-film propaganda, seperti *Pengkhianatan G 30 S PKI* (1984) karya Arifin C. Noer. Karya yang sering dikategorikan dokudrama ini adalah film yang mengangkat situasi politik yang genting di tahun 1965, tentang penculikan enam orang jenderal dan satu orang perwira oleh pasukan Cakrabirawa. Narasi film berdurasi 271 menit mengacu pada satu versi sejarah yang bertujuan untuk menglorifikasi sosok Suharto sebagai pahlawan. Film ini menjadi tontonan yang diulang setiap menjelang Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Cara kerja penguasa di mana film dan siaran radio dijadikan propaganda massal berjalan sangat aktif di era NAZI melalui Joseph Goebbels. Rusaknya logika serta retorika antikomunisme dalam masyarakat kita merupakan tanggung jawab negara dalam negara yang telah merekayasanya dalam berbagai bentuk. Di wilayah mental atau psikologis, cuci-otak berlangsung lewat penataran, pidato resmi, pelajaran sejarah resmi, media massa, museum, dan monumen, serta, terakhir dan yang terpenting adalah film (Heryanto, 2017).

Film propaganda adalah tontonan yang bersifat satu arah. Tidak ada kesempatan bagi penonton untuk bertindak komunikatif. Penguasa seolah menutup Ruang Publik karena khawatir munculnya intepretasi sejarah baru di luar sejarah resmi yang dipegang oleh pemerintah Orde Baru. Melalui film propaganda seperti *Pengkhianatan G 30 S PKI* dan lanjutannya, film *Djakarta 1966* (1988), kehidupan sosial diatur oleh sebuah kerangka logika dan retorika tak masuk akal, yang dari waktu ke waktu menjungkirbalikkan norma politik negara, sistem pendidikan dan pengetahuan umum di sekolah, berikut media massa, hingga kehidupan sehari-hari (Heryanto, 2017).

Pascareformasi 1998, film *Pengkhianatan G 30 S PKI* sempat dihentikan penayangannya oleh Pemerintah B.J. Habibie melalui Menteri Penerangan saat itu Yunus Yosfiah (Historia, 2018). Baru pada 2003, film dokumenter *Shadow Play: Indonesia's Year of Living Dangerously* karya Chris Hilton, *The Act of Killing* (Jagal) pada 2012 dan *The Look of Silence* (Senyap) pada 2014 karya sutradara Joshua Oppenheimer hadir sebagai antitesis terhadap narasi besar yang selama ini dibangun oleh penguasa terhadap peristiwa 1965. Antitesis terhadap isu utama di Ruang Publik ini pula yang ingin disasar oleh film *Sexy Killers*.

Konsep kritik yang linear dengan kondisi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan era pembangunan (Susetiawan, 1997: 4). Kritik dalam film dokumenter *Sexy Killers* erat kaitannya dengan jargon pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2014-2019. Salah satunya,

Program listrik 35ribu Megawatt adalah manifestasi dari era pembangunan yang dimaksud.

Awalnya, film dipandang sebagai bagian dari produk budaya kapitalisme. Namun, dalam konteks *Sexy Killers*, paradigma itu bergeser. Melalui film dokumenter ini, Ruang Publik dan Masyarakat Komunikatif menjadi keniscayaan di dalam masyarakat kita.

4.2 Film Dokumenter sebagai Pembuka Ruang Publik

Meski *Sexy Killers* dirilis pada tahun Pemilu, menurut Dandhy Dwi Laksono sang sutradara, Watchdoc tidak memiliki agenda wajib untuk merilis film di setiap gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, Pascapemilu tahun 2014, film dokumenter pertama mereka *Yang Ketujuh* karya pertama diputar perdana dengan menyelenggarakan acara *nobar* (nonton bareng) di Museum Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta, pada 16 Agustus 2014. Bekerja sama dengan lembaga riset Katadata, animo penonton membludak hingga 3000 penonton (Erlangga, 2019).

Selain *Yang Ketujuh* merujuk pada pemilihan presiden RI yang ketujuh, film ini juga menjadi film dokumenter ketujuh yang pernah tayang secara komersial di bioskop. Sebelumnya, ada *Student Movement in Indonesia* (Tino Saroengallo, 2002), *the Jak* (Andibachtiar Yusuf dan Amir Pohan, 2007), *Pertatuhan* (Lucky Kuswandi, Ucu Agustin, Iwan Setiawan, Ani Ema Susanti, dan Muhammad Ichsan, 2008), *The Conductors* (Andibachtiar Yusuf, 2008), *Setelah 15 Tahun* (Tino Saroengallo, 2013), dan *Jalanan* (Daniel Ziv, 2014), di tahun yang sama dengan

tayangannya *Yang Ketujuh* (Sasono, 2014).

Antusiasme publik terhadap *Yang Ketujuh* tidak berhenti setelah penayangan di Kota Tua atau jaringan bioskop saja. Setelah beberapa waktu hak ciptanya dimiliki oleh KompasTV, kini *Yang Ketujuh* bisa diakses langsung melalui kanal Youtube. Per 31 Juli, film tersebut sudah diakses sebanyak 263 ribu penonton. Jumlah yang terhitung besar untuk sebuah film dokumenter yang berdurasi panjang sekitar 75 menit atau satu jam lima belas menit.

Yang Ketujuh adalah karya yang mengkisahkan pergulatan hidup empat narasumber di tengah kemeriahan pesta demokrasi. Keempat narasumber tersebut adalah warga suburban dengan profesi marjinal seperti petani, pembantu rumah tangga, tukang ojek pangkalan, dan petani penggarap. Film ini mengisahkan dua ruang berbeda, ruang kehidupan para tokoh dan ruang keriuhan pesta demokrasi. Ruang para tokoh memvisualkan kehidupan sehari-hari, bergelut dengan keterbatasan upah, sempitnya tempat tinggal, hingga harapan-harapan di masa depan. Ruang lainnya menggambarkan tentang alur hidup dua kandidat presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, dari 2009 hingga menuju kontestasi Pemilu 2014.

Ruang *Yang Ketujuh* yang terbagi ke dalam kontras kemeriahan pesta demokrasi dan pergulatan hidup empat berfungsi sebagai potongan-potongan visual yang saling melengkapi. Namun tidak semua sepakat bahwa kedua ruang itu terintegrasi dalam tayangan itu, melainkan berdiri sendiri-sendiri: tidak ada adegan yang secara jelas menghubungkan mereka, sehingga masing-masing terisolasi satu sama lain

(Putranda, 2014). Bagi sebagian yang lain, film ini berhasil menghadirkan persoalan penting yang selama ini terabaikan yaitu lantanganya suara-suara “orang-orang kalah” memasuki ruang publik (Sasono, 2014).

Terlepas dari perdebatan substansi film, *Yang Ketujuh* bisa dikatakan sebagai titik tolak terbentuknya Ruang Publik di mana antarindividu berinteraksi, menonton, dan berdiskusi tentang sesuatu yang selama ini dikategorikan sebagai tayangan yang “berat” dan “tidak menghibur”. Agenda Nobar di Museum Fatahillah menunjukkan bahwa film bisa menjadi *trigger* atau pemicu untuk sebuah diskursus publik melalui diskusi setelah film usai ditonton (Erlangga, 2019).

Ruang Publik di sini adalah ruang demokratis di mana masyarakat berada dalam diskursus yang membuka lebar pintu opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa disampaikan secara diskursif. Dari definisi inilah, *Yang Ketujuh* bukanlah awal sekaligus akhir dari perjalanan film dokumenter *Watchdoc* yang bermuatan advokasi yang terdiri atas kritik terhadap kebijakan penguasa.

Kurang dari setahun, di akhir 2014, *Watchdoc* kembali merilis film dokumenter terbaru di kanal Youtube berjudul *Belakang Hotel*. Film yang dibuat atas kerja sama dengan Komunitas Warga Berdaya di Yogyakarta ini menyoroti menjamurnya pembangunan hotel di wilayah Yogyakarta yang merugikan masyarakat sekitar akibat keringnya air tanah. Masifnya Pembangunan hotel ini diiringi oleh penyedotan air besar-besaran demi kebutuhan operasional dan tamu hotel.

Ketika film *Belakang Hotel* diunggah di kanal Youtube, para warga di kampung-kampung yang difilmkan menggelar acara nonton bareng. Sederhananya, acara itu membludak karena banyak penonton ingin melihat aksi mereka sendiri dalam film. Ternyata tetangga kampung lain, terutama di kawasan yang akan mengalami penggusuran akibat pembangunan apartemen, tergerak untuk melakukan kegiatan yang sama. Alhasil, agenda *nobar* film *Belakang Hotel* berlangsung masif dari kampung ke kampung. Padahal di sisi lain, *Belakang Hotel* bukanlah tontonan berbayar karena bisa diakses gratis di kanal Youtube. Namun, masyarakat justru ingin berdiskusi tentang film dan relevansinya dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Dandhy sebagai sutradara, bahwa film mereka hanya pemicu untuk diskusi yang lebih intens (Erlangga, 2019)

Dari sinilah, Ruang Publik terbuka lebar. Masyarakat tidak hanya berkumpul untuk menikmati tontonan hiburan, seperti halnya budaya layar tancap di masa lalu. Pemutaran *Belakang Hotel* telah mengubah premis bahwa publik lebih menyukai tontonan “ringan” dan “menghibur” karena memang tidak ada pilihan lain di televisi atau saluran tontonan lain. Premis itu patah karena di Yogyakarta, pada 2014, acara menonton bareng berlangsung secara masif. Film itu secara tidak langsung membuka mata pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur DI Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Sultan mengapresiasi film dokumenter berdurasi 40 menit itu sebagai karya yang menyadarkan publik tentang kerusakan lingkungan akibat maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta (Tempo, 2015).

Cita-cita Dandhy, sebagai sutradara, agar film-film bermuatan advokasi yang dirilis Watchdoc mampu menjadi pemicu terwujudnya diskursus publik semakin menemukan jalannya. Jalan yang dimaksud adalah berlangsungnya *Ekspedisi Indonesia Biru*, sebuah perjalanan bersepeda motor selama setahun mengelilingi Indonesia sekaligus meliput isu-isu lingkungan.

4.3 *Sexy Killers*, Alat Kritik, dan Keniscayaan Masyarakat Komunikatif

Sebelum *Sexy Killers* dirilis, jejak Watchdoc dalam memproduksi film dokumenter cukup intens. Rumah produksi yang didirikan Dandhy bersama Andy Panca Kurnia ini terhitung produktif. Hingga tahun 2019, Watchdoc telah memproduksi 125 episode dokumenter dan 540 *feature* televisi. Empat puluh video di antaranya dapat penghargaan. Sebagian besar, meski bersifat komersial, film-film karya Watchdoc tidak pernah jauh dari isu sosial, lingkungan hidup, politik, dan hukum, seperti *Kiri Hijau Kanan Merah* (2010) tentang aktivis HAM Almarhum Munir Said Thalib dan *Alkinemokiye* (2012) tentang kehidupan pekerja tambang Freeport.

Sexy Killers sendiri tidak bisa dilepaskan dari Ekspedisi Indonesia Biru yang dilakukan pada 2015. Perjalanan yang dilakukan oleh dua jurnalis, Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Az (Ucok), itu mengelilingi Indonesia dari 1 Januari hingga 31 Desember 2015 sekaligus meliput isu-isu lingkungan di beberapa titik lokasi yang dilintasinya. Sepanjang ekspedisi, Dandhy dan Suparta menelurkan 12 film dokumenter, dimulai dari *Samin vs Semen*, *Kala Benoa*, *Lewa di*

Lembata, *Mahuze*, dan lain-lain. Dengan keterbatasan peralatan dan akses Internet di beberapa wilayah, Dandhy dan Ucok mengunggah film-film tersebut di lokasi liputan. Namun, tidak semua hasil dokumentasi selama perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru langsung diolah menjadi film. Beberapa isu besar, terutama industri sawit dan tambang batu bara, diendapkan selama tiga hingga empat tahun untuk melengkapi kekurangan data sekaligus memperbesar magnitudo efek tayangannya.

Sexy Killers dibangun atas dasar kolaborasi dan gotong royong. Hal itu dilakukan untuk memperkuat isu kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara bisa lebih komprehensif. Berbeda dengan film *Samin vs Semen*, *Kala Benoa*, atau *Mahuze* yang bisa fokus pada satu titik lokasi, di mana isu lingkungan terjadi. Film *Samin vs Semen* mengangkat persoalan konflik antara masyarakat Samin dengan perusahaan Semen Indonesia. Film *Kala Benoa* mengangkat perlawanan terhadap reklamasi pantai di Pulau Bali. Sedangkan *Mahuze* menyoroti kebijakan pangan ambisius pemerintah melalui *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) melawan kearifan lokal pangan masyarakat Papua. Ketiga film di atas memang dirancang untuk menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri dan nyatanya berhasil menginspirasi dan menggerakkan diskursus di Ruang Publik, melalui kegiatan menonton bareng dan diskusi intens membedah film-film tersebut. Namun, *Sexy Killers* membutuhkan jangkauan yang lebih luas dan tidak bisa hanya menyoroti satu lokasi.

Kekuatan *Sexy Killers* ada pada kemampuannya memetakan jalur distribusi batu bara dari hulu hingga

hilir yang masing-masing memberikan dampak kerusakan lingkungan, kerugian materil, hingga korban jiwa yang tidak sedikit. Dimulai dari Kalimantan Timur, *Sexy Killers* langsung menyorot kamera pada lubang-lubang galian bekas tambang yang kini sudah bersalin rupa menjadi kubangan mirip danau besar. Kubangan itu ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tambang tanpa melakukan reklamasi. Dampaknya sungguh pilu. Sejumlah anak tewas tenggelam saat bermain di lubang tambang tanpa ada satu pihak pun mau bertanggung jawab. Kepiluan lain dapat dilihat dari jerat hukum bagi mereka yang ingin membela haknya atas lahan sendiri. Film ini di antaranya mengangkat kisah Nyoman Derman, transmigran asal Negara, Bali, yang menggarap lahan sejak 1980 di desa Kertabuana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Namun, kehadiran perusahaan tambang mengusik lahannya dengan merusak jalur air. Protes Nyoman berujung pada penangkapan karena mengganggu operasional perusahaan lantas dipenjarakan selama tiga bulan. Sanksi hukum yang diterima Nyoman membuat petani lain memilih bungkam.

Sorotan kamera tidak berhenti di hulu. Tongkang pengangkut batu bara berlayar dari Sarmarinda, Kalimantan Timur, menuju Pulau Jawa. Kapal-kapal besar itu mendistribusikan pasokan batu bara demi hidupnya turbin PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Jawa. Namun, jalur distribusi tongkang batu bara itu melintasi kawasan konservasi Kepulauan Karimunjawa. Hilir mudiknya tongkang berakibat buruk pada kondisi terumbu karang yang hancur akibat aktivitas kapal pengangkut emas hitam itu, seperti melepas jangkar hingga

pencemaran akibat tumpahnya bagian batu bara ke laut.

Kondisi lebih pilu bisa ditemukan di hilir, atau tepatnya di kawasan PLTU-PLTU berdiri, seperti di Kabupaten Batang, Jawa Tengah; Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; Kabupaten Buleleng, Bali; Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak hanya kerusakan lingkungan seperti produktivitas tanaman yang menurun, populasi ikan yang semakin sedikit, hingga munculnya penyakit infeksi saluran pernapasan hingga kanker.

Sexy Killers tidak hanya membabarkan kritik dengan menampilkan sejumlah korban kebijakan penambangan baru batu bara hingga pendirian PLTU. Film ini juga memberikan alternatif tentang pengembangan energi terbarukan tidak lagi mimpi melalui sosok I Gusti Ngurah Agung Putradhyana atau Gung Kayon, yang melakukan konversi panas sinar matahari menjadi energi listrik. Gung Kayon menggunakannya mulai dari skala pribadi dan rumah tangga. Mimpi besarnya, Indonesia yang berlimpah cahaya matahari ini bisa mandiri dengan energi terbarukan.

Peta dari hulu ke hilir inilah yang kemudian memberikan kekuatan pada *Sexy Killers* sebagai film yang utuh. Mirip dengan film *Asimetris* (2018), yang menyorot industri kelapa sawit di sejumlah daerah, tidak hanya Kalimantan Barat, melainkan pula Jambi dan Papua. Saat melakukan ekspedisi, Dandhy dan Ucok hanya berhasil menangkap kondisi yang terjadi di Kalimantan Timur atau bagian hulu dari keseluruhan cerita *Sexy Killers*. Dandhy berpendapat bahwa sorotan pada satu titik wilayah hanya membuat film dokumenternya nanti mudah dipatahkan. Sehingga,

diperlukan areal liputan yang lebih luas dan mendalam. Ia endapkan dulu pengembangan *Sexy Killers* karena memang tidak ada tuntutan *deadline* dalam pengerjaannya (Erlangga, 2019).

Seperti halnya pengerjaan film-film mereka sebelumnya seperti *Belakang Hotel*. Maka, *Sexy Killers* juga hasil dari kerja kolaboratif dan gotong royong dengan berbagai pihak di antaranya Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), Green Peace, juga komunitas nelayan yang melakukan perlawanan terhadap tongkang-tongkang batu bara (Beritagar, 2019).

Bagian terpentingnya, *Sexy Killers* berhasil memetakan oligarki dalam isu lingkungan ini. Melalui tampilan infografis, film ini menampilkan kepemilikan saham dari masing-masing perusahaan energi batu bara yang juga berkaitan dengan PLTU-PLTU. Lantas muncullah nama-nama elite politik yang saat itu sedang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2019. Infografis itu menunjukkan bahwa kedua kubu kandidat memiliki jabatan atau kepemilikan dalam perusahaan. Rangkaian infografis itu juga menunjukkan bahwa dalam persoalan politik di permukaan mereka berkompetisi dalam Pemilu, namun dalam ranah bisnis mereka saling berkaitan satu sama lain.

Figur-figur lingkaran utama pasangan calon nomor satu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Hary Tanoesoedibjo, Oesman Sapta Odang, Andi Syamsudin Arsyad, hingga Jusuf Kalla, memiliki kepemilikan saham atau terkait dengan perusahaan tambang batu bara. Calon wakil presiden Joko Widodo, K.H. Ma'ruf Amin juga tidak lepas dari sorotan karena MUI lembaga yang dipimpinya memberi stempel halal

bagi kegiatan pasar modal sejumlah perusahaan batu bara. Di kubu seberang, selain Prabowo dan Sandiaga sendiri yang menguasai kepemilikan sejumlah perusahaan energi batu bara, lingkaran terdekat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga tidak lepas dari kepemilikan saham di perusahaan energi ini, seperti adik Prabowo, Hashim Djojohadikumo, dan direktur relawan BPN (Badan Pemenangan Nasional) kubu Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan.

Menampilkan infografis dalam film tentang oligarki kepemilikan batu bara ini mirip dengan cara yang dilakukan oleh sutradara Michael Moore dalam film *Sicko*. Dalam film dokumenter yang dirilis pada 2007, Moore menampilkan grafis yang menyoroti keterikatan anggota parlemen dengan industri farmasi yang menyokongnya. Dalam grafisnya, tiap orang ditandai atau diberi simbol untuk menunjukkan mereka mendapat sumbangan dari pihak mana saja. Secara visual, grafis yang dirancang Moore dalam *Sicko* memiliki efek yang kuat terutama kepada elite politik yang kongkalikong dengan perusahaan farmasi.

Film *Sexy Killers* yang tadinya berdurasi sekitar dua jam lebih, dipotong menjadi 1 jam 32 menit, lalu akhirnya menjadi hanya berdurasi 88 menit (Beritagar, 2019). Dandhy sadar bahwa premis utama *Sexy Killers* adalah menggambarkan peta oligarki Indonesia, khususnya dalam kebijakan energi. Bagi Dandhy, sang sutradara, jika persoalan energi batu bara ini tentang oligarki, maka bicara yang tepat tentang oligarki kekuasaan adalah saat Pemilu berlangsung. Pemilihan waktu penayangan perdana dimulai saat minggu tenang, saat di mana semua perdebatan wacana antarpending dua

calon presiden mengalami “*shut-down*”. Uniknya, *Sexy Killers* justru mengangkat persoalan lingkungan hidup, isu periferi dibandingkan dengan isu-isu HAM atau toleransi. Karena itu, menurut Dandhy selaku sutradara, isu pinggiran akan bisa terseret arus utama jika memanfaatkan momentum Pemilu Serentak 2019 (Erlangga, 2019).

Pada saat yang sama, perdebatan antarkandidat terutama di level bawah semakin jauh dari substansi persoalan yang dekat dengan realitas. Perdebatan absurd seperti saling klaim jumlah pendukung di Gelora Bung Karno, dinilai Dandhy perlu dikembalikan lagi menuju diskursus publik yang lebih substansial (Erlangga, 2019).

Ia pun memutuskan untuk mengunggah film *Sexy Killers* tiga hari menjelang pencoblosan. Efeknya sungguh di luar dugaan. *Sexy Killers* meraih jumlah 1,5 penonton dalam waktu dua hari setelah diunggah. Jumlah ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan konten-konten dari kreator Youtube populer lain, karena *Sexy Killers* bukanlah materi “menghibur”. Angka yang di luar dugaan karena hanya dua film Watchdoc yang mendapatkan animo penonton lebih dari 1 juta itu pun harus menunggu selama satu tahun lebih dari pertama kali diunggah (Erlangga, 2019).

Sejak 5 hingga 13 April 2019, nobar *Sexy Killers* tercatat di 476 titik di seluruh Indonesia, dengan sebaran penonton mencapai 30 hingga 50 di tiap titik (Suara, 2019). Keriuhan *Sexy Killers* juga terjadi di dunia maya sebagai manifestasi konsep Ruang Publik di era digital. Data Drone Emprit Akademik menunjukkan percakapan seputar *Sexy Killers* di Twitter mengemuka sejumlah negara di dunia,

yaitu Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Jepang, Cile, dan Turki secara berurutan dalam peringkat di bawah Indonesia dengan jumlah pendengung (*buzzer*) terbanyak (Purnama, 2019). Sedangkan di Indonesia sendiri, kota Jakarta menempati posisi tertinggi untuk wilayah dengan jumlah *mention Sexy Killers* terbanyak dengan 2131 kali. Disusul kota pelajar, Yogyakarta, dan kota kembang, Bandung, dengan selisih keduanya sebanyak 61 *mention* (Purnama, 2019)

Fakta dan data terkait animo publik terhadap *Sexy Killers* menunjukkan kian terbukanya Ruang Publik di Indonesia, sekaligus keniscayaan terhadap eksistensi Demokrasi Deliberatif. Kemunculan Demokrasi Deliberatif ini ditandai dengan intensitas partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi atau opini, melalui fenomena *nobar Sexy Killers* hingga perang opini di media sosial. Penayangan *Sexy Killers* semakin mendorong opini publik, terutama terkait kelestarian lingkungan hidup, untuk memengaruhi pemegang kekuasaan agar merumuskan kebijakan yang berpihak pada isu lingkungan.

Dalam pandangan Habermas, Demokrasi Deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan yang dirumuskan oleh mereka yang memegang mandat mendekati harapan pihak yang diperintah. Deliberasi semakin intens melalui diskursus publik ini merupakan jalan untuk mewujudkan hakikat demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) Sinisme terhadap keberimbangan *Sexy Killers* sendiri dapat dengan mudah dipatahkan oleh adagium lama dari jurnalis Amerika Serikat pada era

1950-an, Edward R. Murrow, yang menegaskan bahwa film dokumenter tidak harus merepresentasikan realitas yang berimbang. Jadi, menurut Murrow, jika ada yang mempertanyakan itu, maka kita bisa menanyakan sebaliknya: sejauh mana mereka memahami arti realitas dan keberimbangan itu sendiri (Aufderheide, 2007). Kehadiran *Sexy Killers* diklaim memberikan dampak elektoral pada kedua kandidat. Namun, Direktur Program Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sirojudin Abbas menyebut film dokumenter tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan karena persoalan batu bara bukan khas Indonesia, melainkan di semua negara-negara berkembang yang mengandalkan energi dari “emas hitam” yang ekonomis tersebut (Gatra, 2019). Bahkan, Pemilu 2019 ini mencatat angka partisipasi pemilih yang meningkat dari 75 persen di 2014 menjadi 81 persen di tahun 2019.

5. Simpulan

Film dokumenter, yang selama ini dianggap sebagai produk yang serius dan tidak disukai publik, berjudul *Sexy Killers*, justru mampu berperan sebagai alat kritik yang efektif terhadap dua kandidat yang sedang berkompetisi. Film ini membuka mata publik dengan menunjukkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan penambangan batu bara yang melibatkan elite-elite politik.

Sebuah tayangan yang memiliki konten serius pun dapat menyedot perhatian publik asalkan memenuhi sejumlah syarat. Pertama, isu yang diangkat adalah sesuatu yang baru atau tidak terjamah selama ini. Kedua, pemilihan realitas di lapangan terkait pihak-pihak yang menjadi bagian dari film. Faktor kedua ini menunjukkan bagaimana *Sexy Killers* dengan tepat memilih sosok petani Nyoman Derman hingga Mat Juri nelayan asal Karimun Jawa sebagai korban dari pembangunan PLTU dan penambangan batu bara. Tepatnya pemilihan figur dalam *Sexy Killers* ini mirip dengan yang dilakukan oleh Joshua Oppenheimer saat memilih Anwar Congo, pelaku pembantaian orang-orang yang diduga PKI di Sumatera Utara, dalam film *Act of Killing* pada 2012 lalu.

Film ini berhasil menggemakan Ruang Publik dengan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa disampaikan secara diskursif. Akses tontonan hingga 2,4 juta hingga akhir Juli 2019 menunjukkan bahwa ketertarikan publik terhadap isu-isu yang dekat pada kehidupan mereka ternyata sangat besar. Namun, diperlukan penelitian lanjutan, terutama sejauh mana sebuah tayangan visual yang bermuatan kritik mampu mempengaruhi elektabilitas kandidat secara terukur dan kuantitatif, terutama di wilayah yang terpapar langsung oleh kebijakan energi batu bara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufderheide, Patricia. (2007). *Documentary Film: A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford.
- Ayawaila, Gerzon R. (2008). *Dokumenter: Dari Ide sampai Produksi*. Jakarta: FFTV-IKJ Press
- Cook, David A. (1990). *A History of Narrative Film*, 2nd edition. New York: W. W. Norton,
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Buku Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia
- Haris, Syamsuddin (ed.). (2016). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Heryanto, Ariel (2017). *Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa*. *Historia*. Diakses dari <http://www.historia.id>
- Isnani, Hendri F. (2018). *Orang-orang di Balik Penghentian Penayangan Film Pengkhianatan G30S/PKI*. *Historia.id*. Diakses dari <http://www.historia.id>
- Jusuf, Windu. (2014). *Sang Patriot: Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Sang Jendral*. *Cinemapoetica*. Diakses dari <http://www.cinemapoetica.com>
- Laksono, Dandhy Dwi. (2019, 30 Juli). *Film sebagai Alat Kritik Kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019*. (Y. Erlangga, interviewer)
- Purnama, Yuli Finsensus. (2019). *Hari Sexy Killers Sedunia*. *Timesjatim*. Diakses dari <http://www.m.timesjatim.com>
- Putranda, Pandji. (2014). *Yang Ketujuh: Selesai Pesta, Lalu Apa?* *Cinemapoetica*. Diakses dari <http://www.cinemapoetica.com>
- Ritzer, George. (2007). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Massachusetts: Blackwell Publishing
- Sanita, Meigitaria. (2019). *Film Sexy Killers Tak Pengaruhi Jumlah Golput*. *Gatra*. Diakses dari <http://www.gatra.com>
- Sasono, Eric (2014). *Politik Hal Ihwal dan Film Dokumenter*. *Historia*. Diakses dari <http://www.historia.id>
- Sindhunata. 2019. *Teori Kritis Sekolah Frankfurt: Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia
- Susetiawan. (1997). *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial*. *UNISIA NO. 32/XVII/IV*, halaman 3-16
- Triyono, Heru. (2019). *Dandhy Laksono: So what kalau Sexy Killers bikin golput*. *Beritagar*. Diakses dari <http://www.beritagar.id>
- Zakaria, Anang. (2015). *Gara-gara Tonton 'Di Belakang Hotel' Sultan Jadi Sadar*. *Tempo*. Diakses dari <http://www.tempo.co>